

*Catatan atas tulisan A. Chaedar Alwasilah*

## **CDA dan Paradigma Ilmu Bahasa**

Oleh DADANG S. ANSHORI

Kemampuan nalar dan produktivitas menulis sebagai wujud nalar dengan pembelajaran bahasa di tanah air masih jauh panggang dari api. Persoalannya, barangkali bukan hanya yang disampaikan A. Chaedar Alwasilah (ACA), yakni karena pembelajaran bahasa tidak menghasilkan kemampuan berpikir kritis (KBK) bagi para mahasiswa atau siswa, tetapi lebih dari itu bahasa secara umum memang mendapatkan kooptasi dari sebuah sistem kekuasaan yang menjelma menjadi kebudayaan yang selama ini menggerogoti nalar kita. Barangkali, di sini perlu disebut bahwa pendidikan yang diharapkan menghasilkan manusia kritis dan bernalar, justru masih berada dalam kooptasi tersebut. “Budaya santun” misalnya tampak masih merupakan hegemoni dan tafsir sepihak “kaum tua” dibandingkan sikap *equal* yang seharusnya dikembangkan agar kaum muda berpikir kritis. Dalam dunia akademik kita, berbeda pendapat kadang-kadang masih menjadi persoalan, apalagi kalau perbedaan tersebut diungkap ke publik dan diwacanakan. Bahkan menulis sebuah persoalan di media massa pun, masih ada yang menghubungkannya dengan kesantunan seseorang.

Alhasil persoalan berpikir kritis bukan lagi persoalan latar belakang pendidikan bahasa atau bukan. Apalagi kalau ukuran nalar dan kritis tersebut adalah tulisan (budaya tulis). Sama halnya, tidak semua alumni jurusan ekonomi bekerja di sektor ekonomi. Alumni jurusan pertanian yang seharusnya mengurus pertanian, malah kerja di bank. Orang-orang kritis dan bernalar tinggi dan mewujudkannya melalui tulisan dalam sistem pendidikan saat ini masih merupakan “kelainan”. Pada umumnya, seorang mahasiswa berkuliah hanya untuk mendapatkan selebar ijazah dan pekerjaan. Mereka yang menyiapkan waktunya untuk asah pikir hanya segelintir saja. Namun demikian, ajakan ACA untuk membuat lebih kritis mahasiswa program bahasa, tentu tak tertawarkan lagi karena fasilitas keilmuan untuk hal itu memang sudah tersedia secara leluasa.

### **Kritis Struktur**

Pendekatan struktural dalam ilmu kebahasaan merupakan pendekatan tertua dan sangat dominan. Hingga kini, pendekatan ini tampak dalam pembelajaran kebahasaan, berupa tata bahasa. Persoalan tata bahasa ini sering dijadikan kambing hitam ketidakmampuan siswa atau mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Fonologi, Morfologi, dan Sintaksis cenderung tidak mengalami perkembangan alias begitu-begitu juga. Sementara ilmu-ilmu sosial atau ilmu humaniora lainnya sudah jauh berkembang.

Sesungguhnya mata kuliah-mata kuliah tersebut telah melahirkan mahasiswa yang kritis, walaupun hanya “kritis struktur”. Paling tidak, mereka mampu melakukan penyikapan berbahasa masyarakat. Namun, apabila ukuran kritis adalah tulisan, ilmu-ilmu tersebut memang secara fungsional belum memberikan jawaban yang memuaskan. Perkuliahan Sintaksis tidak serta merta membuat mahasiswa pandai menulis yang pada dasarnya merangkai kalimat. Dapat dipahami, lamanya pendekatan struktur dalam pendidikan bahasa telah menyebabkan siswa dan mahasiswa menjadi pengguna bahasa secara pasif.

Pendekatan struktur pun tidak bekerja sebagaimana sebuah pendekatan keilmuan. Kooptasi kekuasaan nyata dan dapat dilihat dari berbagai kewajiban menggunakan bahasa yang “baik dan benar”. Dengan kata lain, kekuasaan menghendaki bahasa yang “tertib” bukan bahasa yang kritis. Orde Baru telah menjadikan bahasa sebagai salah satu strategi melawan dan menanamkan kekuasaan. Penelitian Langenberg (1986) menemukan “kata kunci” untuk menunjukkan pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, yakni: *orba*, *dwifungsi*, *karyawan*, *pembangunan*, dan *pancasila*. Dari kelima kata kunci tersebut ia menyebutkan bahwa Orde Baru adalah suatu negara yang otoriter, teistik, korporatis, terlembaga, dan sedang mengalami perubahan struktural (Widjojo dan Noorsalim, 2004). Untuk dapat sampai pada pemaknaan seperti itu, tidak bisa melalui pendekatan struktural.

Bahasan tadi hanya ingin menunjukkan bahwa bahasa kritis telah dikubur jauh-jauh hari sejak Orde Baru berdiri. Jika kita hendak menjadikan bahasa sebagai alat berpikir kritis, maka kita pun perlu mereformasi paradigma keilmuan bahasa termasuk pendekatan-pendekatan pembelajaran bahasa yang digunakan selama ini. Hanya sekadar menunjukkan kerisauan, mengapa penelitian bahasa dan sastra di LPTK masih menggunakan pendekatan kuantitatif yang jelas-jelas memposisikan bahasa secara pasif. Dan parahnya, ketika jurusan-jurusan murni dibuka, cara berpikir ini dibawa serta dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pola-pola berpikir lama. Bagaimanapun pengkajian bahasa melalui pendekatan struktural hanya melahirkan “kritis struktur” tadi, bukan kritis berpikir dan bernalar, apalagi kritis dalam mengungkap ideologi dan kooptasi kekuasaan melalui bahasa.

### **CDA dan Paradigma Kritis**

*Critical Discourse Analysis* (CDA) merupakan salah satu pendekatan kritis terhadap teks-teks bahasa. CDA menempatkan teks hanya salah satu bagian di samping kognisi sosial, dan konteks. Ahli bahasa struktural tidak memperhatikan kognisi sosial dan konteks. Oleh karena itu, kajian mereka hanya pada struktur bahasa. CDA akan membongkar apa motif orang berbahasa atau apa ideologi dibalik sebuah teks. Cara kerja seperti ini menempatkan bahasa sebagai subjek aktif atau disebut juga subjektif. Teks menurut CDA tidak bisa dipisahkan dari kognisi sosial dan konteks, karena ketiganya yang akan membentuk makna.

CDA pada akhirnya bukan hanya sebagai teori atau pendekatan, tetapi berwujud sebagai metode dan alat analisis. Teun Van Dijk, Sara Mills, Norman Fairclough adalah beberapa nama yang mengembangkan analisis wacana kritis. Namun, untuk sampai pada persoalan CDA sebagai metode dan alat analisis bahasa, perlu ada perubahan radikal dalam paradigma berpikir tentang bahasa, terutama penelitian bahasa.

Awal untuk menghidupkan CDA adalah harus hadirnya payung paradigma kritis dalam penelitian bahasa. Aliran kritis merupakan “perlawanan aliran empiris” yang berkembang dan didirikan oleh *Frankfurt Institute of Social Research* Frankfurt, Jerman, pada 23 Februari 1923 sehingga disebut Mazhab Frankfurt dengan tokoh Adorno, Horkheimer, Benjamin, dan Marcuse.

Menurut Hall media adalah kunci utama pertarungan kekuasaan melalui nilai-nilai kelompok dominan yang dimapankan, dibuat berpengaruh, dan menentukan apa yang diinginkan oleh khalayak (Eriyanto, 2001: 29). Aliran Frankfurt membuktikan bahwa media menjadi alat pemerintah untuk mengontrol publik, menjadi sarana

pemerintah untuk mengobarkan semangat perang. Media bukanlah entitas yang netral, tetapi bisa dikuasai oleh kelompok dominan (Eriyanto, 2001:23).

Secara ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, penelitian kritis berbeda dengan paradigma klasik (positivisme) dan paradigma konstruktivisme. Secara ontologis, realitas yang teramati (*virtual reality*) merupakan realitas “semu” yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik. Secara epistemologis dijelaskan bahwa hubungan antara peneliti dengan realitas yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Pemahaman tentang sesuatu realitas merupakan *value mediated findings*. Secara aksiologis bisa dijelaskan bahwa 1) nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian; 2) peneliti menempatkan diri sebagai *transformative intellectual*, advokat, dan aktivis; 3) tujuan penelitian, yaitu kritik sosial, transformasi, emansipasi, dan *social empowerment*. Secara metodologis, penelitian kritis: 1) Mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multilevel analisis yang bisa dilakukan melalui penempaan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial; 2) Kriteria kualitas penelitian adalah *historical situatedness*, yakni sejauh mana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Hidayat, 1999:39-40).

Paradigma inilah yang mengantarkan mengapa kajian-kajian seperti CDA menjadi sangat penting dalam mempelajari bahasa, seiring dengan hadirnya dekapan fungsional dalam memandang bahasa sebagai sebuah realita sosial. Sejalan dengan CDA, kita juga bisa mengidentifikasi alat analisis sejenis, seperti Semiotika, Stilistika, Dramaturgi, Fenomenalogi, Kajian Lintas Budaya, Femenisme, Interaksi Simbolik dll. yang sama-sama mengkaji “realitas dalam” dari sebuah tampilan bahasa.

Persoalannya, penelitian yang menyebut dirinya kualitatif, terutama di LPTK rata-rata tidak memiliki *grand theory* yang mapan. Padahal-padahal teori-teori tersebut telah tersedia dengan beragam. Penelitian sastra misalnya, masih berkulat di antara dua unsur sastra (intrinsik dan ekstrinsik), padahal teori-teori tersebut lahir untuk mengkaji karya-karya sastra. Di sinilah, LPTK yang sekarang mengembangkan ilmu-ilmu murni harus mempertegas diri, dan tidak mem-LPTK-kan program-program murni yang memang beda peruntukannya. Perlu disebutkan di sini, dibandingkan dengan ilmu bahasa, ilmu sosial seperti sosiologi dan komunikasi sudah sejak lama menggunakan teori-teori tersebut untuk mengkaji fenomena berkomunikasi masyarakat.

Memang tidak begitu jelas yang dipertanyakan ACA, secara paradigmatis ilmu bahasa sudah sangat mapan. Bahwa ada persepsi kebermanfaatannya ilmu tersebut dan persoalan produk dari ilmu itu, tidak lantas menjadi “Ada Apa dengan Ilmu Bahasa?” Persoalan sikap kritis dan bernalar juga tidak identik dengan *critical discourse analysis* (CDA). Sikap kritis dan bernalar adalah persoalan budaya masyarakat, baik berlatar belakang bahasa atau tidak. Dasar-dasar ilmu bernalar ada pada setiap cabang ilmu, andai kita sepakat bahwa filsafat adalah induk dari ilmu.

Agar terbangun asumsi bahwa mengajarkan bahasa secara otomatis mengajarkan KBK (kemampuan berpikir kritis) diperlukan perangkat lain, yakni kognisi sosial dan konteks. Untuk memahami keduanya, ilmu bahasa harus berpadu dengan sosiologi, komunikasi, filsafat, antropologi, psikologi dll. Bagaimana cara berinteraksinya? Adalah tugas para guru besar memberikan “penerang” agar ilmu tidak lumpuh, sebagaimana budaya baca tulis kita. *Wallahu alam \*\*\**

*Penulis adalah dosen Universitas Pendidikan Indonesia.*